



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA**

# **SUPLEMEN RENSTRA TAHUN 2010-2014**

**NOMOR : KEP-1/PW18/1/2013**  
**TANGGAL : 3 JANUARI 2013**



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA**

---

KEPUTUSAN  
KEPALA PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA  
NOMOR : KEP - 4/PW18/1/2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN BADAN  
PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI SULAWESI UTARA  
NOMOR KEP-4505/PW18/1/2010 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERWAKILAN  
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BPKP PROVINSI  
SULAWESI UTARA TAHUN 2010-2014

KEPALA PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3293/M.PAN RB/11/2012 tanggal 30 November 2012 tentang Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan perlu melakukan revisi Rencana Strategis (Renstra) BPKP dan Indikator Kinerja Utama (IKU);
  - b. bahwa sesuai Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-1644/K/SU/2012 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-34/K/SU/2010 tentang Rencana Strategis BPKP Tahun 2010-2014 dan Keputusan Kepala BPKP Nomor 111/K/SU/2010 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama BPKP, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara perlu mereviu Renstra dengan menambah sasaran strategis dan melakukan perbaikan IKU;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara tentang Perubahan Keputusan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara Nomor KEP-4505/PW18/1/2010 tentang Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010-2014.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
  3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;

4. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2010-2014;
5. Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 0142/M.PPN/06/2009 dan Nomor 1848/MK/2009 tentang Pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran;
6. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-06.00.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
7. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: PER-61/K/SU/2012.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- Pertama : Menyatakan bahwa sasaran strategis dalam rumusan Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara 2010-2014 merupakan indikator pencapaian tujuan strategis;
- Kedua : Menambah butir-butir tambahan Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara 2010-2014 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- Ketiga : Suplemen Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara 2010-2014 sebagaimana dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Manado  
Pada tanggal : 3 Januari 2013

Kepala Perwakilan

Adil Hamonangan Pangihutan  
NIP 19610605 198703 1 001

**BUTIR-BUTIR TAMBAHAN RENSTRA  
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA  
TAHUN 2010-2014**

**2.4. SASARAN STRATEGIS**

Delapan sasaran strategis yaitu kondisi yang diharapkan di akhir periode Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara 2010-2014, yaitu:

1. Meningkatnya kualitas 95% LKKL, dan 95% LKPD;
2. Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,5%;
3. Terselenggaranya Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 60% Instansi Pemerintah Daerah (IPD) dan terselenggaranya Good Governance (GG) pada 75% BUMN/BUMD;
4. Meningkatkan kesadaran dan keterlibatan K/L/Pemda, BUMN/BUMD dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi menjadi 80%;
5. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP di 68,75% K/L/Pemda;
6. Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 75% Pemda;
7. Meningkatnya efektivitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaan keuangan sebesar 100%;
8. Terselenggaranya satu sistem dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan.

Uraian lebih lanjut atas sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:

**1. Meningkatnya Kualitas 95% LKKL, dan 95% LKPD**

Meningkatnya kualitas laporan keuangan kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Utara merupakan tekad BPKP sebagai perwujudan fungsi *consulting*. Upaya strategis ini dilakukan sebagai persyaratan minimal untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara. Kegiatan yang dirancang untuk mencapai sasaran strategis ini adalah memberikan pemahaman intensif kepada kementerian/lembaga dan pemda di wilayah Provinsi Sulawesi Utara tentang peran laporan keuangan yang berkualitas baik dalam forum pertemuan antar kementerian/lembaga/pemda maupun melalui penggalangan langsung dengan penandatanganan nota kesepahaman antara BPKP dengan mitra kerja BPKP. Sosialisasi ini

diharapkan mengefektifkan fungsi pendampingan penyusunan ataupun reviu atas laporan keuangan sebelum diterbitkan oleh K/L/Pemda. *Outcome* yang diharapkan adalah laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditunjukkan dengan opini yang diperoleh dari BPK RI minimal Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

## **2. Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,50%**

Sasaran Strategis “Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara” merupakan sasaran strategis pengawasan dari sisi penerimaan negara. BPKP melihat masih banyak sumber penerimaan anggaran yang perlu dioptimalkan melalui strategi intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan. Sasaran strategis ini memiliki dua Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu persentase hasil pengawasan OPN/OPD yang ditindaklanjuti dan persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke Pusat.

## **3. Terselenggaranya Standar Pelayanan Minimal pada 60% Instansi Pemerintah Daerah dan Terselenggaranya *Good Governance* pada 75% BUMN/BUMD**

Sebagai auditor internal pemerintah, terkait dengan perannya dalam meningkatkan akuntabilitas Pemda dan pengelolaan BUMN/BUMD di wilayah Provinsi Sulawesi Utara, Perwakilan BPKP perlu mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan Kementerian Teknis, dan mendorong BUMN/BUMD untuk menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG). Indikator untuk mengukur sasaran ini adalah “Jumlah Instansi Pemerintah Daerah (IPD) yang melaksanakan pelayanan sesuai SPM”, “BUMN/BUMD/BUL/BLUD yang dilakukan sosialisasi/asistensi GCG/*Key Performance Indicator* (KPI)” dan “BUMD yang dilakukan audit kinerja”.

## **4. Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L/Pemda, BUMN/BUMD dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%**

Perpres Nomor 55 Tahun 2012 menyatakan bahwa strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi memiliki visi jangka panjang dan menengah. Visi jangka panjang tahun 2012-2025 adalah “Terwujudnya Kehidupan Bangsa yang Bersih dari Korupsi dengan Didukung Nilai Budaya yang Berintegritas”.

Pemerintah merancang enam strategi diantaranya adalah strategi pencegahan tindak pidana korupsi. Dalam strategi ini BPKP perlu mengambil

peran dalam mendukung enam strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan mendorong penerapan sistem pengendalian intern atau *Fraud Control Plan (FCP)*. Berkaitan dengan penegakan hukum atas tindak pidana korupsi, Perwakilan BPKP berperan membantu Aparat Penegak Hukum (APH) di wilayah Provinsi Sulawesi Utara melalui kegiatan audit investigasi, perhitungan kerugian keuangan negara, serta menjadi saksi ahli kasus tindak pidana korupsi. Indikator pencapaian sasaran strategis ini adalah “Kelompok masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi”.

Dengan pemahaman ini IPP/IPD/BUMN/BUMD yang berisiko fraud dapat mengimplementasikan FCP, membuat atau mengoreksi kebijakan, atau memastikan penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan, menyesuaikan harga, dan menyelesaikan pembayaran klaim pihak ketiga. Tidak kalah penting dengan pemahaman ini masyarakat diharapkan meningkatkan pengaduan kepada Perwakilan BPKP yang berisi informasi tindak pelanggaran yang merugikan Negara yang pada akhirnya Perwakilan BPKP dapat menyerahkan kasus kepada APH di wilayah Provinsi Sulawesi Utara.

#### **5. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 68,75% K/L/Pemda**

Penyelenggaraan SPIP pada dasarnya merupakan tanggung jawab masing-masing menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota. BPKP sesuai pasal 59 PP Nomor 60 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bertanggung jawab melakukan pembinaan. Pembinaan SPIP diarahkan agar instansi pemerintah dapat menyelenggarakan SPIP dalam rangka mencapai tujuannya melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah” diindikasikan oleh satu IKU dominan dengan menghitung jumlah K/L/Pemda yang laporan keuangannya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI dibandingkan dengan jumlah seluruh K/L/Pemda. Opini WTP atas laporan

keuangan diyakini dapat mewakili sistem pengendalian yang memadai sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 60 Tahun 2008, karena audit keuangan yang dilaksanakan oleh BPK RI mencakup pengujian atas keandalan sistem pengendalian K/L/Pemda.

#### **6. Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten pada 75% Pemda**

Sebagai sebuah organisasi, salah satu faktor penentu keberhasilan APIP adalah kompetensi dan profesionalitas sumber daya manusia (SDM), karena faktor manusia yang mengatur dan menggerakkan jalan organisasi. SDM yang kompeten adalah SDM yang memiliki penguasaan teoritis, didukung dengan pengalaman, dan mendapat pengakuan keahlian spesifik berdasarkan standar yang berlaku umum dalam lingkungan keahlian tersebut. SDM yang professional adalah SDM yang mampu melaksanakan tugas dengan baik, sesuai dengan bidang keahliannya. Keahlian tersebut perlu terus-menerus diperbaharui dan ditingkatkan, baik melalui program pendidikan gelar maupun program pendidikan non-gelar dengan mengacu pada dokumen *Human Capital Development Plan (HCDP)* yang merupakan dokumen perencanaan pengembangan kompetensi pegawai yang terkait dengan proses pelatihan, pendidikan, dan kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan pengetahuan, keahlian, kemampuan, nilai-nilai, dan aset sosial lainnya yang dimiliki pegawai.

IKU yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran strategis ini adalah persentase Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA.

#### **7. Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan Sebesar 90% dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Sebesar 100%**

Sistem perencanaan pengawasan merupakan salah satu bagian dari sistem manajemen dukungan yang berperan penting dalam membantu keberhasilan pelaksanaan kegiatan teknis BPKP. Perencanaan pengawasan berfungsi mengarahkan kegiatan pengawasan agar sesuai dengan peran dan tujuan BPKP sekaligus media untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja teknis BPKP. Selain itu, perencanaan juga terkait langsung dengan pengelolaan SDM, penyediaan sarana prasarana, dan penganggaran. Seiring dengan gencarnya penyerapan anggaran berdasarkan *disbursement plan*, semakin dirasakan pentingnya arti perencanaan yang baik sehingga anggaran yang

digunakan benar- benar menghasilkan kinerja yang terbaik sesuai tujuan dan tepat guna.

Sasaran “Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan sebesar 90% dan Kualitas Pengelolaan Keuangan sebesar 100%” diindikasikan oleh dua IKU dominan yang terkait langsung dengan efektivitas perencanaan pengawasan dan kualitas pengelolaan keuangan.

#### **8. Terselenggaranya Satu Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan Bagi Pimpinan**

Sejalan dengan perubahan lingkungan strategis pada BPKP terutama dengan terbitnya PP Nomor 60 Tahun 2008, menegaskan identitas BPKP sebagai Auditor Presiden. Sehubungan dengan itu, BPKP dituntut untuk memberikan informasi yang berharga bagi Presiden dan mampu memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi pemerintah. Selain itu, Perwakilan BPKP juga harus mampu memberikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen di tingkat BPKP Pusat.

Sasaran strategis ini diukur menggunakan indikator capaian “Jumlah Sistem Informasi yang dimanfaatkan secara efektif”.



## 2.5. INDIKATOR KINERJA UTAMA SASARAN STRATEGIS

### 2.5.1. IKU *OUTCOME*

Untuk mencapai delapan sasaran strategis di butir 2.4 terdapat 36 Indikator Kinerja Utama (IKU). Uraian lebih rinci tentang masing-masing IKU beserta target 2011 – 2014 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rumus Pengukuran	Satuan	2011	2012	2013	2014
1	Meningkatnya Kualitas 95% LKKL, dan 95% LKPD	1. Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Instansi vertikal yang mendapat pendampingan dibanding Target dalam PKPT	Persen	100%	100%	100%	100%
		2. Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP	Jumlah IPD yang memperoleh opini minimal WDP dibandingkan dengan jumlah IPD yang diasistensi	Persen	80%	85%	90%	95%
		3. Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan Wajar	Jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan Wajar dibandingkan dengan jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang diaudit	Persen	80%	82%	82%	82%
		4. Persentase hasil pengawasan lintas sektoral yang disampaikan ke Pusat	Jumlah laporan yang dikirim ke Pusat dibandingkan target laporan dari Pusat	Persen	100%	100%	100%	100%
		5. Persentase hasil pengawasan atas permintaan presiden yang disampaikan ke Pusat	Jumlah laporan yang dikirim ke Pusat dibandingkan target laporan dari Pusat	Persen	100%	100%	100%	100%
		6. Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders	Persentase laporan pengawasan atas permintaan stakeholder disampaikan tepat waktu (sesuai RPL dalam KM4)	Persen	73%	80%	86,67%	93,33%
		7. Persentase BUMD yang mendapat pendampingan penyelenggaraan akuntansi	Jumlah BUMD yang mendapat pendampingan penyelenggaraan akuntansi dibagi dengan jumlah seluruh BUMD di wilayah kerja perwakilan.	Persen	50%	50%	60%	70%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rumus Pengukuran	Satuan	2011	2012	2013	2014
2	Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,50%	8. Persentase hasil pengawasan optimalisasi penerimaan negara/daerah yang ditindaklanjuti	Jumlah tindak lanjut (rekomendasi/saran) dibagi dengan jumlah rekomendasi/saran hasil audit OPN/OPAD	Persen	68%	75%	80%	87,50%
		9. Persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke Pusat	Jumlah laporan yang dikirim ke Pusat dibandingkan target laporan dari Pusat	Persen	100%	100%	100%	100%
3	Terselenggaranya SPM pada 60% IPD dan terselenggaranya GG pada 75% BUMN/BUMD	10. Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal	Jumlah IPD yang mencantumkan SPM dalam dokumen perencanaan dibagi jumlah IPD yang diaudit kinerja pelayanan	Persen	100%	100%	100%	100%
		11. Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/asistensi GCG/KPI	Jumlah BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/asistensi/evaluasi GCG/KPI dibandingkan dengan target PKPT	Persen	100%	100%	100%	100%
		12. Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja	Jumlah BUMD yang diaudit kinerja dibandingkan target PKPT	Persen	100%	100%	100%	100%
4	Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%	13. Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi	Jumlah Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi	Kelompok Masyarakat	3	3	2	3
		14. IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD berisiko fraud yang mendapatkan sosialisasi/DA/asistensi/ evaluasi FCP	Jumlah instansi yang mendapatkan sosialisasi/DA/ bimtek/ evaluasi FCP	Instansi	2	3	2	2
		15. Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD yang dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK	Jumlah instansi yang dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK tahun berjalan	Instansi	1	1	1	1
		16. Persentase Pelaksanaan penugasan HKP, klaim dan penyesuaian harga	Jumlah laporan HKP, klaim dan penyesuaian harga yang terbit dibagi dengan permintaan HKP, klaim dan eskalasi yg memenuhi syarat (diterbitkan ST)	Persen	82%	84%	84%	84%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rumus Pengukuran	Satuan	2011	2012	2013	2014
		17. Persentase Pelaksanaan audit investigasi/ PKKN/PKA	Jumlah laporan audit investigasi/PKKN/PKA dibagi dengan permintaan audit investigasi/PKKN/PKA dari instansi penegak Hukum	Persen	85%	85%	85%	85%
		18. Persentase TL hasil audit investigasi non TPK oleh instansi berwenang	Jumlah TL atas temuan investigasi non TPK dibagi dengan jumlah temuan non TPK s.d. tahun berjalan	Tindak Lanjut	-	-	40%	50%
		19. Persentase hasil telaahan pengaduan masyarakat	Jumlah hasil telaahan dibandingkan dengan jumlah pengaduan yang masuk	Persen	100%	100%	100%	100%
5	Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 68,75% K/L/Pemda	20. Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008	Jumlah Pemda yang opini LK WTP dibandingkan jumlah seluruh Pemda	Persen	6,25%	6,25%	18,75%	68,75%
		21. Jumlah Pemda yang dilakukan asistensi penyelenggaraan SPIP sesuai PP No 60 Tahun 2008	Jumlah Pemda yang dilakukan asistensi penyelenggaraan SPIP sesuai PP No 60 Tahun 2008 sampai dengan tahun berjalan	Pemda	0	0	4	8
		22. Jumlah Pemda yang dilakukan monitoring Sistem Pengendalian Intern	Jumlah Pemda yang dilakukan monitoring Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sampai dengan tahun berjalan	Pemda	0	0	4	8
6	Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 75% Pemda	23. Persentase Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA	Jumlah Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA di bandingkan jumlah seluruh Pemda	Persen	6,25%	12,50%	62,50%	75,00%
7	Meningkatnya efektifitas perencanaan	24. Persentase jumlah rencana pengawasan yang terealisasi	Realisasi PP PKPT dibandingkan dengan target PP dalam PKPT	Persen	75%	80%	90%	90%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rumus Pengukuran	Satuan	2011	2012	2013	2014
	pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaan keuangan sebesar 100%.	25. Persentase kesesuaian laporan keuangan Perwakilan BPKP dengan SAP	Hasil reuiu Inspektorat terhadap laporan keuangan perwakilan, dengan nilai 100% apabila tidak ada catatan, dan 80% apabila ada catatan	Persen	100%	100%	100%	100%
		26. Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan kepegawaian	Hasil survai kepuasan pegawai perwakilan atas layanan kepegawaian	Skala <i>likert</i> 1-10	6,75	7,00	7,8	8,00
		27. Persentase Pagu Dana yang tidak Diblokir dalam DIPA	Jumlah dana DIPA Perwakilan yang tidak diblokir DJA dibagi dengan jumlah dana DIPA Perwakilan (tahun n+1)	Persen	100%	100%	100%	100%
		28. Persepsi kepuasan pegawai perwakilan atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai prosedur	Hasil survai kepuasan pegawai perwakilan atas layanan keuangan	Skala <i>likert</i> 1-10	6,80	7,00	8,25	8,50
		29. Jumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP di media massa	Jumlah berita tentang kegiatan perwakilan BPKP di media massa	Berita	26	26	26	26
		30. Persentase pemanfaatan asset	Total asset dikurangi asset kondisi baik/kurang baik yang tidak digunakan dibandingkan total asset	Persen	75%	75%	85%	100%
		31. Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan sarpras	Hasil survai kepuasan pegawai perwakilan atas layanan sarpras	Skala <i>likert</i> 1-10	6,80	7,00	8,10	8,30
		32. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat	Jumlah tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat dibandingkan dengan jumlah rekomendasi Inspektorat yang diterima sampai dengan tahun berjalan	Persen	80%	80%	80%	80%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rumus Pengukuran	Satuan	2011	2012	2013	2014
		33. Jumlah masukan topik penelitian yang disampaikan ke puslitbangwas	Jumlah masukan topik penelitian yang disampaikan ke puslitbangwas	Topik Penelitian	1	1	1	1
		34. Jumlah instansi APIP yang telah disosialisasi dan atau di-assessment tata kelola APIP	Jumlah instansi APIP yang telah disosialisasi dan atau di-assessment tata kelola APIP	Instansi APIP	2	4	6	8
		35. Tingkat persepsi kepuasan Pemda atas auditor bersertifikat	Survey kepuasan pejabat struktural Pemda terhadap pejabat fungsional auditor (PFA) di lingkungan APIP Pemda.	Skala <i>likert</i> 1-10	7,00	7,50	7,50	8,00
8	Terselenggaranya 100% sistem dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan	36. Jumlah Sistem Informasi yang dimanfaatkan secara efektif	Jumlah sistem informasi yang dimanfaatkan dibagi dengan jumlah sistem informasi yang wajib dimanfaatkan BPKP (SIM HP, SIM RKT, SIM MonevRKT, SAKPA, SIMAK BMN, RKAKL, SPM, SPPD, DMS, SIMPEG)	Persen	90%	100%	100%	100%

Uraian lebih lanjut atas indikator kinerja sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:

**1. Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan Laporan Keuangan**

Keberhasilan pencapaian IKU ini diukur dengan menghitung jumlah IPP/instansi vertikal yang mendapat pendampingan dibanding target dalam PKPT.

**2. Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP**

BPKP juga berupaya mendorong akuntabilitas keuangan Pemerintah Daerah ke arah yang lebih baik dengan IKU “Persentase Instansi Pemerintah Daerah (IPD) yang Laporan Keuangannya Memperoleh Opini Minimal WDP” dari BPK RI. Keberhasilan pencapaian IKU ini diukur dari realisasi jumlah IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP dibandingkan dengan jumlah IPD yang diasistensi oleh BPKP.

**3. Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan wajar**

IKU “Persentase Jumlah Laporan Keuangan Proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan Wajar” merupakan IKU lainnya dalam pencapaian sasaran meningkatnya Sasaran Strategis 1. IKU ini diukur dari jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan wajar dibandingkan dengan jumlah laporan keuangan proyek Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) yang diaudit.

**4. Persentase hasil pengawasan lintas sektor yang disampaikan ke Pusat**

Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mandat yang diberikan kepada BPKP antara lain melakukan pengawasan *intern* terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral. Dengan PP tersebut, BPKP mempunyai kewenangan yang lebih luas dan juga keunggulan kompetensi dalam melakukan pengawasan intern yang bersifat lintas sektoral dibandingkan dengan APIP lainnya, sehingga pengawasan atas program/kegiatan yang melibatkan beberapa pihak dan terkait dengan berbagai aspek dapat dilakukan oleh BPKP. IKU ini diukur dengan jumlah laporan yang dikirim ke Pusat dibandingkan target laporan dari Pusat.

**5. Persentase hasil pengawasan atas permintaan Presiden yang disampaikan ke Pusat**

IKU ini merupakan indikator pencapaian Sasaran Strategis 1 dalam rangka pelaksanaan tugas BPKP melakukan pengawasan intern melalui kegiatan pengawasan lainnya berdasarkan penugasan dari Presiden, sesuai amanat pasal 49

ayat (2) butir c PP 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Capaian IKU ini diukur berdasarkan persentase jumlah laporan yang dikirim ke Pusat dibandingkan target laporan dari Pusat.

**6. Persentase hasil pengawasan atas permintaan *stakeholder* yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh *stakeholders***

IKU ini merupakan IKU lainnya untuk mencapai Sasaran Strategis 1. IKU ini diukur dengan menghitung persentase laporan pengawasan atas permintaan *stakeholders* disampaikan tepat waktu (sesuai RPL dalam KM 4).

**7. Persentase BUMD yang mendapat pendampingan penyelenggaraan akuntansi**

Perwakilan BPKP berperan aktif dalam pendampingan penyusunan Laporan Keuangan BUMD di wilayah Provinsi Sulawesi Utara agar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Oleh karena itu pendampingan ini dianggap mendukung pencapaian Sasaran Strategis 1 dengan IKU “Persentase BUMD yang mendapat pendampingan penyelenggaraan akuntansi”.

IKU ini diukur dengan menghitung jumlah BUMD yang mendapat pendampingan penyelenggaraan akuntansi dibagi dengan jumlah seluruh BUMD di wilayah kerja Perwakilan.

**8. Persentase hasil pengawasan optimalisasi penerimaan negara/daerah yang ditindaklanjuti**

Dalam rangka berperan melakukan optimalisasi penerimaan negara, BPKP menetapkan “persentase hasil pengawasan optimalisasi penerimaan negara/daerah yang ditindaklanjuti” sebagai IKU yang dominan dalam mengindikasikan ketercapaian sasaran strategis Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara. Pengawasan atas penerimaan negara antara lain untuk mendorong upaya perbaikan sistem manajemen Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang transparan dan akuntabel, sehingga penerimaan yang berasal dari PNBP menjadi meningkat sesuai dengan potensi yang diharapkan.

Kinerja IKU ini diukur jumlah tindak lanjut (rekomendasi/saran) dibagi dengan jumlah rekomendasi/saran hasil audit OPN/OPAD.

**9. Persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke Pusat**

Pemerintah melalui PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pasal 49 ayat (2) butir b. menegaskan bahwa BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan Negara atas kegiatan

Kebendaharaan Umum Negara dengan tujuan untuk memberikan masukan kepada Menteri Keuangan. Menindaklanjuti amanat tersebut, dalam mendukung tugas BPKP Pusat, maka dalam Renstra, Perwakilan BPKP membentuk IKU berupa “Persentase Hasil Pengawasan BUN yang disampaikan ke Pusat”. Capaian IKU ini diukur berdasarkan persentase jumlah laporan yang dikirim ke Pusat dibandingkan target laporan dari Pusat.

**10. Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal**

Dasar hukum pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2010–2014, yang mewajibkan setiap Pemda untuk menerapkan Standar Pelayanan Minimal. Selain itu juga terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 yang mensyaratkan implementasi SPM dilakukan dengan menuangkan indikator SPM pada dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan serta pada dokumen penganggaran daerah. Selanjutnya Inpres Nomor 1 Tahun 2010 juga mengharuskan Pemda melakukan SPM yang ditetapkan oleh kementerian teknis. Berdasarkan PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pasal 48 ayat (2) butir a dan pasal 50 ayat (1) butir a, menyebutkan bahwa BPKP melakukan pengawasan intern antara lain melalui audit kinerja diantaranya dimaksudkan untuk memperbaiki pelayanan publik.

IKU ini diukur dengan persentase jumlah IPD yang mencantumkan SPM dalam dokumen perencanaan dibagi jumlah IPD yang diaudit kinerja pelayanan.

**11. Persentase BUMN/BUMD/BLUD yang dilakukan sosialisasi/asistensi GCG atau KPI**

Perwakilan BPKP berperan melakukan pengawasan intern melalui pemberian pelayanan jasa manajemen kepada BUMN/BUMD/BUL/BLUD di bidang GCG dan KPI di wilayah Provinsi Sulawesi Utara, dengan harapan dapat memperbaiki kinerja BUMN/BUMD/BLUD. Untuk mengukur manfaat, ditetapkan IKU berupa “BUMN/BUMD/BLUD yang dilakukan sosialisasi/asistensi GCG atau KPI”. IKU ini diukur dengan menghitung Jumlah BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/asistensi/evaluasi GCG/KPI dibandingkan dengan target PKPT.



## **12. Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja**

Penetapan IKU “BUMD yang dilakukan audit kinerja”, dimaksudkan untuk mengukur manfaat pengawasan intern yang dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP dalam meningkatkan tata kelola BUMD di wilayah Provinsi Sulawesi Utara.

IKU ini diukur dengan menghitung jumlah BUMD yang diaudit kinerja dibandingkan dengan target PKPT.

## **13. Kelompok masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi**

Dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai praktek-praktek penyelenggaraan *good governance*, Perwakilan BPKP menetapkan suatu IKU berupa kelompok masyarakat di wilayah Provinsi Sulawesi Utara yang mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi. Keberhasilan IKU diukur dari jumlah Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi.

## **14. IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD berisiko *fraud* yang mendapatkan sosialisasi/DA/asistensi/evaluasi FCP**

Sistem pengendalian yang baik akan memberikan jaminan terhadap kualitas dan kinerja organisasi secara keseluruhan, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan korporasi dapat memenuhi prinsip-prinsip *Good Governance*.

FCP merupakan suatu pengendalian yang dirancang secara spesifik untuk mencegah, menangkal, dan memudahkan pengungkapan kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara. FCP terdiri dari atribut-atribut spesifik, yaitu Kebijakan *Anti Fraud*, Struktur Pertanggungjawaban, Penilaian Risiko, Kepedulian Pegawai, Kepedulian Pelanggan dan Masyarakat, Sistem Pelaporan *Fraud*, Perlindungan Pelapor, Pengungkapan kepada Pihak Eksternal, Prosedur Investigasi dan Standar Perilaku dan Disiplin.

IKU ini diukur dengan jumlah instansi yang mendapatkan sosialisasi/DA/bimtek/evaluasi FCP.

## **15. Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD yang dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK**

Upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara tidak terlepas dari adanya kebijakan yang mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan KKN. Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur instansi/BUMN/BUMD di wilayah Provinsi Sulawesi Utara yang

membuat/mengoreksi kebijakan terkait dengan rekomendasi dari Perwakilan BPKP terhadap hasil kajian atas peraturan perundang-undangan yang berindikasi menjadi penyebab terjadinya KKN.

IKU diukur dengan menghitung jumlah instansi yang dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK tahun berjalan.

**16. Persentase pelaksanaan penugasan Kasus HKP, Klaim dan Penyesuaian Harga**

Kasus Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP), klaim dan penyesuaian harga merupakan bagian dari hambatan/kendala terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara. Tingkat keberhasilan penyelesaian kasus tersebut berkorelasi terhadap pencapaian sasaran strategis. Persentase pelaksanaan penugasan HKP, klaim dan penyesuaian harga ditetapkan sebagai salah satu IKU yang harus dicapai.

Pengukuran IKU dihitung berdasarkan jumlah laporan HKP, klaim dan penyesuaian harga yang terbit dibagi dengan permintaan HKP, klaim dan eskalasi yg memenuhi syarat (diterbitkan Surat Tugas).

**17. Persentase pelaksanaan audit investigasi/PKKN/PKA**

Salah satu upaya pencapaian sasaran strategis peningkatan kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara antara lain dengan tertanganinya kasus KKN. Penanganan kasus yang berindikasi KKN yang dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP menjadi lengkap setelah dilimpahkan kepada instansi penegak hukum di wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Dengan demikian "tingkat pelaksanaan audit investigasi/PKKN/PKA" menjadi salah satu IKU BPKP dalam upaya pencapaian sasaran strategis.

Pengukuran IKU dihitung berdasarkan jumlah laporan audit investigasi/ PKKN/PKA dibagi dengan permintaan audit investigasi/PKKN/PKA dari instansi penegak hukum.

**18. Persentase TL hasil audit investigasi non TPK oleh instansi berwenang**

Indikator kinerja utama, hasil audit investigasi yang ditindaklanjuti oleh instansi berwenang. Kinerja utama ini dimaksudkan untuk mengukur rekomendasi non

tindak pidana korupsi pada suatu instansi pemerintah/BUMN/BUMD yang disampaikan kepada manajemen untuk ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang disarankan.

**19. Persentase hasil telaahan pengaduan masyarakat**

Salah satu bentuk akuntabilitas penugasan investigasi terletak pada pemenuhan standar pelaporan hasil penugasan. Hal ini berdampak pada efektivitas pengungkapan dan penanganan kasus yang berindikasi KKN dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara. Untuk itu, dalam Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara dibentuk IKU “Persentase hasil telaahan pengaduan masyarakat”.

Realisasi IKU dihitung berdasarkan persentase jumlah hasil telaahan dibandingkan dengan jumlah pengaduan yang masuk.

**20. Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008**

Penyelenggaraan SPIP dinilai sesuai PP 60 Tahun 2008 melalui tingkat maturitas. Sebelum penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP dapat dilaksanakan, maka IKU “Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP 60/2008” diukur dengan menghitung jumlah Pemda yang opini Laporan Keuangan WTP dibandingkan jumlah seluruh Pemda. Opini WTP atas laporan keuangan diyakini dapat mewakili sistem pengendalian yang memadai sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 60 Tahun 2008, karena audit keuangan yang dilaksanakan oleh BPK RI mencakup pengujian atas keandalan sistem pengendalian Pemda.

**21. Jumlah pemda yang dilakukan asistensi penyelenggaraan SPIP Sesuai PP No 60 Tahun 2008**

Penerapan SPIP di Pemda diawali dengan pembuatan desain penyelenggaraan SPIP yaitu dokumen yang berisi tahap-tahap pengembangan detail SPIP yang akan dilakukan. Manfaat desain adalah sebagai acuan dan alat untuk memantau perkembangan penyelenggaraan SPIP.

Pengukuran IKU dihitung berdasarkan Jumlah Pemda yang dilakukan asistensi penyelenggaraan SPIP sesuai PP No 60 Tahun 2008 sampai dengan tahun berjalan.

**22. Jumlah pemda yang dilakukan monitoring Sistem Pengendalian Intern**

BPKP selaku pembina penyelenggaraan SPIP, berkewajiban memantau perkembangan penyelenggaraan SPIP K/L/Pemda. Pelaksanaan monitoring perbaikan SPI di Lingkungan Instansi Pemerintah didasarkan pada Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-852/K/2011 tentang Pedoman Monitoring Perbaikan SPI di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun 2011.

**23. Persentase pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA**

Pelaksanaan audit intern di lingkungan instansi pemerintah dilakukan oleh pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan telah memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor. Hal ini sesuai dengan Pasal 51 PP 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Syarat kompetensi keahlian sebagai auditor dipenuhi melalui keikutsertaan dan kelulusan dalam program sertifikasi.

Oleh karena itu, setiap APIP mengimplementasikan JFA sebagai konsekuensi adanya fungsi dan peran pelaksanaan tugas pengawasan intern oleh auditor sesuai ketentuan tersebut.

Pengukuran IKU dihitung berdasarkan jumlah Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA di bandingkan jumlah seluruh Pemda.

**24. Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang terealisasi**

Sistem perencanaan pengawasan merupakan salah satu bagian dari sistem manajemen dukungan yang berperan penting dalam membantu keberhasilan pelaksanaan kegiatan teknis BPKP.

IKU "Persentase Jumlah Rencana Penugasan Pengawasan yang Terealisasi" diukur dengan membandingkan realisasi penugasan pengawasan terhadap rencana penugasan pengawasan yang ditetapkan.

**25. Persentase kesesuaian laporan keuangan Perwakilan BPKP dengan SAP**

Salah satu bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan yang baik adalah tingkat kewajaran laporan keuangan yang menjadi opini BPK RI terhadap penyajian laporan keuangan BPKP. IKU "Persentase kesesuaian laporan keuangan Perwakilan BPKP dengan SAP" dibuat untuk mengukur tingkat keberhasilan unit kerja dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAP. Kinerja sasaran

dinilai berdasarkan hasil revidi Inspektorat terhadap laporan keuangan Perwakilan, dengan nilai 100% apabila tidak ada catatan, dan 80% apabila ada catatan.

**26. Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap pelayanan kepegawaian**

Persepsi kepuasan terhadap suatu pelayanan sangat bergantung pada suatu keadaan ketika keinginan, harapan, dan kebutuhan para penerima layanan dapat terpenuhi. Pernyataan kepuasan atau ketidakpuasan diperoleh melalui survei kepada para penerima layanan, dengan metode skala likert 1-10. Perhitungan persepsi kepuasan terhadap pelayanan pengelolaan kepegawaian dilaksanakan dengan metode penyebaran kuesioner secara uji petik kepada pegawai di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara.

**27. Persentase Pagu Dana yang tidak Diblokir dalam DIPA**

Ketersediaan dana yang memadai diperlukan untuk membiayai pelaksanaan tugas dan fungsi BPKP melalui proses penyusunan anggaran, yang menghasilkan dokumen anggaran berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Pagu dana dalam DIPA dapat dilakukan pemblokiran/pemberian tanda bintang oleh DPR untuk kegiatan dalam DIPA yang perlu dimintakan persetujuan dari DPR terlebih dahulu, atau Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) untuk kegiatan pada saat penelaahan belum dilengkapi dengan data dukung yang memadai/lengkap. Realisasi diukur dengan membandingkan antara jumlah pagu dana yang tidak diblokir/diberi tanda bintang dengan total pagu dana dalam DIPA.

**28. Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan atas Pencairan Anggaran yang Diajukan sesuai Prosedur**

Persepsi kepuasan pengguna atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai dengan prosedur adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan pegawai atas pelayanan yang diberikan dalam menyediakan uang untuk membiayai kegiatan yang telah dianggarkan. Pernyataan kepuasan atau ketidakpuasan diperoleh melalui survei kepada para penerima layanan, dengan metode skala likert 1-10.

**29. Jumlah publikasi kegiatan Perwakilan BPKP di media massa**

Eksistensi sebuah organisasi antara lain ditentukan oleh citra organisasi yang terbentuk di lingkungannya. Demikian juga dengan eksistensi BPKP yang ditentukan juga oleh citranya di mata publik. Oleh karena itu, persepsi publik terhadap BPKP menjadi salah satu alat ukur yang relevan dalam menilai kinerja BPKP.

Kinerja IKU ini diukur dengan cara menghitung jumlah berita tentang kegiatan Perwakilan BPKP di media massa.

**30. Persentase pemanfaatan asset**

Indeks Efektivitas Pengelolaan Aset digunakan untuk mengukur pengelolaan dan pengembangan kapasitas sarana dan prasarana di Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara yang dilaksanakan melalui pengelolaan urusan tata usaha, perlengkapan, dan rumah tangga bagi seluruh satuan kerja.

Kinerja IKU ini diukur dengan cara total aset dikurangi aset kondisi baik/kurang baik yang tidak digunakan dibandingkan total aset.

**31. Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan sarpras**

IKU “Persepsi Kepuasan Terhadap Pelayanan Pengelola Sarpras” merupakan indikator tambahan untuk mencapai Sasaran Strategis 7. IKU ini diukur dari tingkat persepsi kepuasan terhadap pelayanan pengelolaan sarpras yang dapat diberikan oleh unit layanan yang bertanggung jawab atas pengelolaan sarpras dengan metode skala likert 1-10.

**32. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat**

IKU “Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat BPKP” merupakan IKU lainnya untuk mencapai Sasaran Strategis 7. IKU ini diukur dengan membandingkan jumlah tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat dibandingkan dengan jumlah rekomendasi Inspektorat yang diterima sampai dengan tahun berjalan.

**33. Jumlah masukan topik penelitian yang disampaikan ke Puslitbangwas**

IKU “Jumlah masukan topik penelitian yang disampaikan ke Puslitbangwas” merupakan IKU lainnya untuk mencapai Sasaran Strategis 7. IKU ini diukur dari jumlah masukan topik penelitian yang disampaikan ke Puslitbangwas.

**34. Jumlah instansi APIP yang telah disosialisasi dan atau di-*assessment* tata kelola APIP**

IKU ini bertujuan untuk mengukur manfaat pembinaan yang dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara dalam mewujudkan auditor yang profesional dan kompeten, serta tata kelola yang baik di lingkungan APIP

Daerah se-Provinsi Sulawesi Utara.

Kriteria yang digunakan untuk menilai bahwa unit APIP telah melaksanakan tata kelola APIP yang baik adalah berdasarkan hasil *assessment* (evaluasi) penerapan tata kelola APIP yang mengacu kepada model *Internal Audit Capability Model* (IACM).

**35. Tingkat persepsi kepuasan Pemda atas auditor bersertifikat**

IKU ini bertujuan untuk mengukur manfaat pembinaan yang dilakukan BPKP selaku instansi pembina JFA dalam mewujudkan auditor berkualitas yaitu auditor yang profesional, efisien, dan efektif sehingga dapat meningkatkan mutu pengawasan.

IKU ini diukur dengan cara survei kepuasan kepada Pimpinan APIP terhadap auditor di lingkungan APIP Daerah.

**36. Jumlah sistem informasi yang dimanfaatkan secara efektif**

IKU ini digunakan untuk mengukur penggunaan/pengimplementasian sistem informasi yang dikembangkan oleh BPKP untuk menghasilkan/menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh unit kerja di lingkungan BPKP. IKU ini diukur berdasarkan jumlah sistem informasi yang dimanfaatkan dibagi dengan jumlah sistem informasi yang wajib dimanfaatkan BPKP yang terdiri dari aplikasi SIM HP, SIM RKT, SIM MonevRKT, SAKPA, SIMAK BMN, RKAKL, SPM, SPPD, DMS, dan SIMPEG.

## 2.5.2. IKU OUTPUT

Untuk mencapai delapan sasaran strategis di butir 2.4 terdapat 25 IKU Output. Uraian lebih rinci tentang masing-masing IKU output beserta target 2011 – 2014 adalah sebagai berikut:

No.	SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja Output	Satuan	2011	2012	2013	2014	
1	Meningkatnya Kualitas 95% LKKL, dan 95% LKPD	1	Laporan hasil bimbingan teknis/asistensi penyusunan LKKL	Laporan	32	16	14	14
		2	Laporan hasil bimbingan teknis/asistensi penyusunan LKPD	Laporan	18	19	12	12
		3	Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN	Laporan	55	23	20	20
		4	Laporan hasil pengawasan lintas sektor	Laporan	77	57	50	50
		5	Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden	Laporan	31	13	22	22
		6	Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder	Laporan	23	6	1	1
		7	Laporan hasil bimbingan teknis/asistensi penyusunan LKBUMD	Laporan	7	3	3	3
2	Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,50%	8	Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara	Laporan	4	1	2	2
		9	Laporan hasil pengawasan BUN	Laporan	84	64	54	54
3	Terselenggaranya SPM pada 60% IPD dan terselenggaranya GG pada 75% BUMN/BUMD	10	Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik	Laporan	42	19	15	15
		11	Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat	Laporan	4	2	3	3
		12	Laporan hasil pengawasan kinerja BUMD	Laporan	12	7	6	6
4	Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%	13	Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi	Laporan	4	5	6	6
		14	Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP	Laporan	9	4	5	5
		15	Laporan hasil kajian pengawasan	Laporan	2	1	1	1
		16	Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Klaim dan Penyesuaian Harga	Laporan	8	6	6	6



No.	SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja Output		Satuan	2011	2012	2013	2014
		17	Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik	Laporan	35	35	33	33
		18	Laporan hasil audit investigasi atas permintaan instansi lainnya	Laporan	-	-	4	2
5	Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 67,75% K/L/Pemda	19	Laporan pembinaan penyelenggaraan SPIP	Laporan	30	12	14	14
6	Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 75% K/L/Pemda	20	Jumlah sosialisasi dan Bimtek Penerapan JFA APIP Daerah	Kegiatan	0	0	10	10
7	Meningkatnya efektifitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaan keuangan sebesar 100%.	21	Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah	Kegiatan	0	10	2	2
		22	Laporan Evaluasi Penerapan tata kelola APIP Daerah	Laporan	2	2	2	2
		23	Laporan dukungan Manajemen Perwakilan BPKP	Laporan	161	162	60	60
		24	Jumlah Sarana dan Prasarana	Unit	108	153	70	70
8	Terselenggaranya sistem dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan	25	Jumlah sistem informasi yang dimanfaatkan oleh Perwakilan BPKP (SIM HP, SIM RKT, SIM MonevRKT, SAKPA, SIMAK BMN, RKAKL, SPM, SPPD, DMS, SIMPEG)	Aplikasi	10	10	10	10

## 2.6. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012

Target Kinerja Tahun 2012 Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara ditetapkan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
<b>1. Meningkatkan Kualitas 95% LKKL, dan 95% LKPD</b>			
Outcome:			
1.1.1	Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan Laporan Keuangan	%	100
1.1.2	Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP	%	85
1.1.3	Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan wajar	%	100
1.1.4	Persentase hasil pengawasan lintas sektor yang disampaikan ke Pusat	%	100
1.1.5	Persentase hasil pengawasan atas permintaan Presiden yang disampaikan ke Pusat	%	100
1.1.6	Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders	%	100
1.1.7	Persentase BUMD yang mendapat pendampingan penyelenggaraan akuntansi	%	50
Output:			
1.2.1	Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL	Laporan	16
1.2.2	Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LKPD	Laporan	19
1.2.3	Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN	Laporan	23
1.2.4	Laporan hasil pengawasan lintas sektor	Laporan	57
1.2.5	Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden	Laporan	13
1.2.6	Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder	Laporan	6
1.2.7	Laporan hasil bimtek/asistensi penyusunan LK BUMD	Laporan	3
<b>2. Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,50%</b>			
Outcome:			
2.1.1	Persentase hasil pengawasan optimalisasi penerimaan negara/daerah yang ditindaklanjuti	%	100
2.1.2	Persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke Pusat	%	100
Output:			
2.2.1	Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara	Laporan	1
2.2.2	Laporan hasil pengawasan BUN	Laporan	64
<b>3. Terselenggaranya SPM pada 60% IPD dan terselenggaranya GG pada 75% BUMN/BUMD</b>			
Outcome:			
3.1.1	Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal	%	100
3.1.2	Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/asistensi GCG/KPI	%	100
3.1.3	Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja	%	100

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
Output:			
3.2.1	Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik	Laporan	19
3.2.2	Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat	Laporan	2
3.2.3	Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD	Laporan	7
<b>4. Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%</b>			
Outcome:			
4.1.1	Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi	Klpk	3
4.1.2	IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD berisiko fraud yang mendapatkan sosialisasi/DA/asistensi/evaluasi FCP	Instansi	4
4.1.3	Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD yang dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK	Instansi	1
4.1.5	Persentase pelaksanaan penugasan HKP, klaim dan penyesuaian harga	%	100
4.1.6	Persentase pelaksanaan audit investigasi /PKKN/PKA	%	100
4.1.7	Persentase hasil telaahan pengaduan masyarakat	%	100
Output:			
4.2.1	Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi	Laporan	5
4.2.2	Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP	Laporan	4
4.2.3	Laporan hasil kajian pengawasan	Laporan	1
4.2.4	Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim	Laporan	6
4.2.5	Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik	Laporan	35
<b>5. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 68,75% K/L/Pemda</b>			
Outcome:			
5.1.1	Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008	%	6,25
5.1.2	Jumlah Pemda Yang dilakukan Asistensi Penyelenggaraan SPIP Sesuai PP No 60 Tahun 2008	Pemda	0
5.1.3	Jumlah Pemda Yang dilakukan monitoring Sistem Pengendalian Intern	Pemda	0
Output:			
5.2.1	Laporan hasil pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang Keuangan Daerah	Laporan	12
<b>6. Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten pada 75% K/L Pemda</b>			
Outcome:			
6.1.1	Persentase Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA	%	12,50
Output:			
6.2.1	Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah	Pemda	0
<b>7. Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan Sebesar 90% dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Sebesar 100%</b>			
7.1.1	Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang	%	80

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
	terrealisasi		
7.1.2	Persentase kesesuaian laporan keuangan Perwakilan BPKP dengan SAP	%	100
7.1.3	Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan kepegawaian	Skala Likert 1-10	7
7.1.4	Persentase Pagu Dana yang tidak Diblokir dalam DIPA	%	100
7.1.5	Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan atas Pencairan Anggaran yang Diajukan sesuai Prosedur	Skala Likert 1-10	7
7.1.6	Persentase permintaan bantuan hukum yang ditindaklanjuti Biro Hukum dan Humas	%	100
7.1.7	Jumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP di media masa	Publikasi	26
7.1.8	Persentase Pemanfaatan asset	%	75
7.1.9	Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan sarpras	Skala Likert 1-10	7
7.1.10	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat	%	80
7.1.11	Jumlah masukan topik penelitian yang disampaikan ke puslitbangwas	Topik	1
7.1.12	Jumlah Instansi APIP yang telah disosialisasi dan atau di-assessment tata kelola APIP	APIP	4
7.1.13	Tingkat persepsi kepuasan Pemda atas auditor bersertifikat	Skala Likert 1-10	7,5
<b>Output:</b>			
7.2.1	Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah	Kegiatan	10
7.2.2	Laporan evaluasi penerapan tatakelola APIP Daerah	Laporan	2
7.2.3	Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP	Laporan	162
7.2.4	Jumlah Sarana Prasarana	Unit	153
<b>8. Terselenggaranya sistem dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan</b>			
<b>Outcome:</b>			
8.1.1	Jumlah Sistem Informasi yang dimanfaatkan secara efektif	%	100
<b>Output:</b>			
8.2.1	Jumlah sistem informasi yang dimanfaatkan oleh Perwakilan BPKP (SIM HP, SIM RKT, SIM MonevRKT, SAKPA, SIMAK BMN, RKAKL, SPM, SPPD, DMS, SIMPEG)	Aplikasi	10

**Anggaran:**

No	Program	Jumlah (Rp)
1.	Program Pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP	3.751.685.000,00
2.	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya-BPKP	9.985.169.000,00
3.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur negara-BPKP	375.000.000,00
Jumlah		14.111.854.000,00

